

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas dibandingkan 14 kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas sebesar 31.558 km² atau sekitar 21,28 persen dari luas provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas sebesar 146.807 km². Berikut ini adalah peta batas wilayah kabupaten Ketapang.



Gambar 4.1 Peta Batas Wilayah Kabupaten Ketapang
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang

Wilayah-wilayah Kabupaten Ketapang juga memiliki batas-batas administrasi daerah didapatkan melalui situs resmi Kabupaten Ketapang portal.ketapangkab.go.id.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara dan Selat Karimata.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, terdapat 13 kecamatan terletak di perhuluan dan sisanya terletak di kawasan pesisir. Kecamatan terluas di Kabupaten Ketapang adalah Kecamatan Kendawangan dengan luas sebesar 5.859 Km² atau sekitar 18,55 persen dari total luas wilayah Kabupaten Ketapang. Sedangkan, kecamatan terkecil terdapat di Kecamatan Delta Pawan dengan luas sebesar 74 km² atau sekitar 0,23 persen dari total luas wilayah Kabupaten Ketapang. (Situs resmi Pemerintah Kabupaten Ketapang <https://portal.ketapangkab.go.id/>)

Dari segi pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perangkat daerah terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan terbagi ke dalam delapan belas Dinas di Kabupaten Ketapang seperti tabel berikut ini.

Tabel. 4.1 Dinas-Dinas di Daerah Kabupaten Ketapang

No	Dinas-Dinas Daerah
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
3.	Dinas Pendidikan
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
6.	Dinas Pemuda dan Olahraga
7.	Dinas Kesehatan
8.	Dinas Perhubungan
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Dinas Pertanian dan Peternakan dan Perkebunan
17.	Satuan Polisi Pramong Praja
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Peraturan Daerah Pasal 8 Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

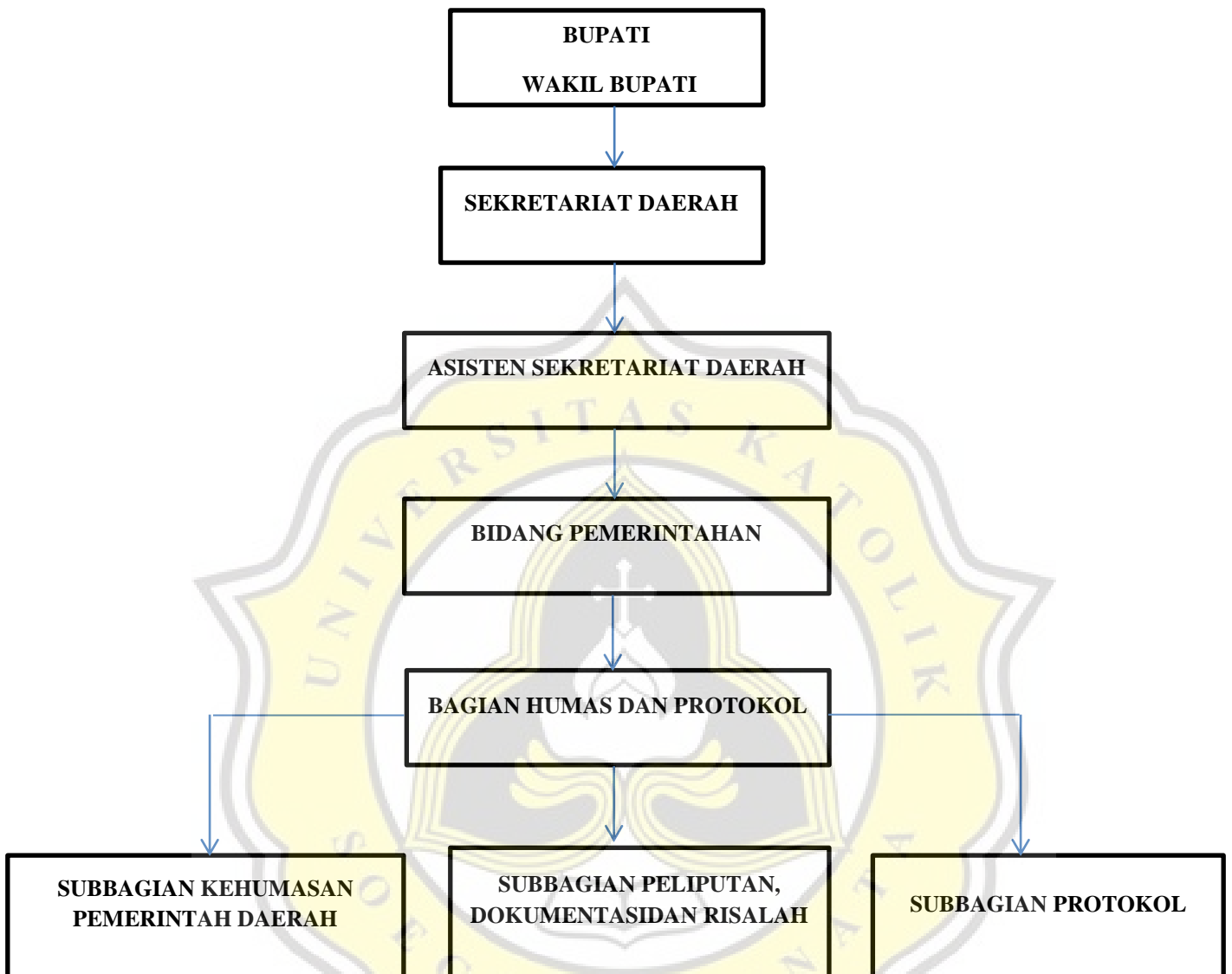
Berdasarkan tabel Dinas Daerah, bagian Humas dan Protokol berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ketapang. Keduanya, mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Selain itu, Diskominfo juga mempunyai bidang komunikasi publik yang di bawahnya terdapat seksi komunikasi publik dan

pengelolaan informasi. Bidang tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi hubungan masyarakat (humas) yang mengarah pada kelancaran arus informasi, penyebarluasan informasi, penghubung instansi hingga manajemen komunikasi.

Selanjutnya, terdapat unsur staf perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah salah satunya ialah Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah. (Perda Kabupaten Ketapang Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2016)

Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing asisten, bagian dan sub bagian.

Sekretariat Daerah memiliki tiga Asisten Sekretariat Daerah yang pertama bidang pemerintahan. Kedua, bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, bidang administrasi umum. Asisten Sekretariat di bidang pemerintahan mencakupi bagian pemerintahan, hukum, serta humas dan protokol. Bidang humas dan protokol dipimpin oleh Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol. Di bawah bidang Humas dan Protokol terbagi lagi menjadi tiga subbagian yaitu subbagian kehumasan pemerintahan daerah, subbagian peliputan, dokumentasi dan risalah, serta subbagian protokol. Dari penjelasan tersebut, tertuang ke dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang pada halaman selanjutnya.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
 Sumber: Peraturan Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2016

Humas Pemkab Ketapang berada di ruang lingkup Setda Ketapang yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Ketapang, dikepalai Oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Ketapang Doni Andriawan, S.STP.,ME. dengan 3 (tiga) Kepala Seb Bagian (Kasubbag): Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokopim)

Hendro Bernunanda, S.Sos.MM, Subbag Peliputan A. Rudy, S.Sos.,M.A.P dan Subbag Protokol Marselius Dedi, S.STP.

Secara Tupoksi Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang memiliki tugas dalam hal publikasi pemberitaan pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.

4.2 Komunikasi Organisasi Humas Kabupaten Ketapang

Komunikasi organisasi yang dijalani Humas Pemkab Ketapang (Humas Ketapang) mencakup komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terimplementasi dari adanya *briefing* yang diberikan atasan kepada bawahan sebelum menjalankan tugasnya. Pemberian *briefing* setiap hari dilakukan oleh Kabag Humas kepada para staf. Hal tersebut dilakukan agar selalu terkoordinasi dan menghindari miskomunikasi dari atasan ke setiap anggota. (Wawancara dengan Kabag Humas, Lampiran 2 hal. c)

Sedangkan, komunikasi eksternal terlihat dari adanya *press release*, majalah/buletin, radio dan *media online* yang dilakukan Humas Ketapang. Di bawah ini merupakan gambar dari bentuk implementasi komunikasi organisasi Humas Ketapang secara eksternal.



Gambar 4.3 *Press release* Posko Covid 2019
 Sumber: Akun Facebook Prokopim Setda Ketapang 2020

Dalam Akun Facebook Humas, *press release* di atas berisikan tentang informasi perkembangan Covid-19 di Kabupaten Ketapang pada Jumat, 1 Mei 2020. *Press release* disampaikan oleh Haji Rustami, SKM. M.Kes selaku Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kabupaten Ketapang. Perkembangan Covid-19 selalu disampaikan satu bulan sekali oleh Humas dan Protokol Setda Ketapang. Selain *press release*, humas menggunakan Radio sebagai komunikasi eksternal.

RKK (Radio Kabupaten Ketapang)



Gambar 4.4 Radio Kabupaten Ketapang (RKK)
 Sumber: Situs resmi Pemerintah Kabupaten Ketapang (portal.ketapangkab.go.id)

Radio Kabupaten Ketapang (RKK) dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Ketapang dan memiliki jangkauan frekuensi 95.2 Fm. RKK di kelola oleh Diskominfo Kabupaten Ketapang. RKK juga mempunyai visi yaitu terwujudnya masyarakat informasi yang berlandaskan nilai dan budaya lokal. Misi dari RKK yaitu mewujudkan pemerataan informasi kepada masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, serta menggali nilai-nilai budaya lokal. Selain radio, humas mempunyai majalah/buletin sebagai media komunikasi eksternal.



Gambar 4.5 Majalah dan Buletin Humpro Ketapang
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Majalah Potret Humas dan Buletin Humpro diterbitkan setiap tiga bulan sekali. Pendistribusian atau segmentasi dari majalah di atas ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang, desa-desa, kecamatan-kecamatan, dinas-dinas, kelurahan-kelurahan, perhotelan, hingga

maskapai. Keterangan tersebut didapatkan dari unggahan tanggal 26 Juli 2018 di Akun *Facebook* Prokopim Setda Ketapang.

Kabag Humas Kabupaten Ketapang Doni Andriawan, menekankan bahwa humas mengkomunikasikan informasi ke beberapa instansi-instansi vertikal yang ada di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, humas membuat media-media informasi di internal. Humas menyadari akan posisinya yang berada dalam satuan organisasi terstruktur dalam pemerintahan. Di samping itu, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan oleh Bupati dan Wakil Bupati juga mendapatkan arahan langsung dari Kepala Sekda. Humas menyadari akan hal tersebut agar wajib dilaksanakan. (Wawancara dengan Kabag Humas, Lampiran 2 hal. c)

Dalam organisasi tentunya dibutuhkan yang namanya komunikasi. Humas Ketapang menyadari sebagai bagian dari suatu organisasi yang selalu menjalankan komunikasi yang dinamis. Seperti adanya kedudukan humas yang berada di bawah pimpinan Sekretariat Daerah. Humas juga menerapkan beberapa istilah dimensi dalam kehidupan organisasi yaitu komunikasi internal yang terbagi lagi menjadi komunikasi vertikal, horizontal dan lateral serta komunikasi eksternal.

Berdasarkan kriteria, komunikasi yang diterapkan oleh Humas Ketapang sudah dilaksanakan, adanya pertukaran pesan dalam struktur organisasi dan kesadaran dalam menjalani komunikasi yang dinamis. Menjadikan humas saling tergantung dengan pihak internal dan eksternal. Humas juga menunjukkan adanya pelaksanaan komunikasi secara vertikal. Hasil wawancara juga menunjukkan

adanya pelaksanaan komunikasi secara formal dari atasan kepada bawahan. Salah satunya dengan menetapkan peraturan kepada anggota agar terhindar dari miskomunikasi dalam bekerja dari atasan kepada bawahan. Salah satunya dengan menetapkan peraturan kepada anggota agar terhindar dari miskomunikasi dalam bekerja.

Bagian Humas Ketapang sudah menjalankan komunikasi organisasi secara internal dan eksternal. Namun, tidak semuanya terlaksana dan terpaparkan kepada publik. Salah satunya komunikasi internal yang terjadi secara horizontal dan lateral. Sedangkan, pelaksanaan komunikasi secara eksternal, humas menggunakan beberapa media dalam temuan peneliti meliputi *press release*, radio, majalah/buletin dan media *online*.

4.3 Komunikasi Pemerintahan

Humas Ketapang menerapkan komunikasi pemerintahan yang saling bergantung satu sama lain. Terlihat dari pelaksanaan komunikasi secara formal dari atasan ke bawahan dalam pemberian arahan sebelum pekerjaan dimulai. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan menjalankan tugas dan fungsi humas. Tujuannya adalah demi kepentingan organisasi.

Menurut Kabag Humas dan Protokol mengatakan humas sangat menyadari posisinya sebagai bagian dari kesatuan organisasi dan komunikasi pemerintahan. Di samping tugas dan fungsi dari peraturan dan amanah dari Bupati dan Wakil

Bupati humas wajib melaksanakan perintah. (Wawancara dengan Kabag Humas, Lampiran 2, hal.c)

Berdasarkan konsep komunikasi pemerintahan, terdapat beberapa ketidaksesuaian humas dalam implementasi. Humas tidak melaksanakan tujuh fungsi komunikasi pemerintahan yang tertuang dalam Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2011. Karena, seringkali komunikasi tersebut dilakukan secara langsung sesuai arahan atasan.

Oleh karena itu, Humas Ketapang menjalankan tugas dan fungsi tidak sepenuhnya berdasar pada peraturan, terdapat improvisasi di lapangan yang memang tidak ada dalam peraturan atau teori.

4.4 Humas Pemerintahan

Humas Ketapang tentunya sangat menyadari sebagai bagian dari pemerintahan. Humas berada pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengelola informasi dan opini publik. Informasi seperti program kegiatan yang disalurkan dengan berbagai media kepada masyarakat serta kerja sama dengan beberapa lembaga contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kabag humas menyatakan bahwa memang terdapat kendala perihal sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas. Untuk mengatasi hal tersebut, humas mengoptimalkan dengan sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, humas melakukan hubungan dengan media informasi dan mengkomunikasikan ke

beberapa instansi vertikal. Serta membuat media-media informasi di internal.
(Wawancara dengan Kabag Humas, Lampiran 2 hal. c)

Berdasarkan konsep humas pemerintahan terdapat kesesuaian dengan data di lapangan. Humas Ketapang wajib menyadari serta menjalankan bagian dari humas pemerintahan. Mulai dari sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan informasi.

Oleh karena itu, humas sebaiknya meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas-fasilitas publikasi dalam rangka mencapai khalayak. Hal itu diterapkan dengan bertujuan untuk penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat secara optimal.

4.5 Tugas Humas Ketapang

Penerapan tugas Humas Ketapang sangat terlihat jelas. Humas melaksanakan tugas meningkatkan kelancaran arus informasi dan meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi.

4.5.1 Meningkatkan kelancaran arus informasi

Dalam kenyataannya Humas Ketapang melaksanakan dan meningkatkan kelancaran arus informasi. Hal-hal tersebut ditunjukkan dari bentuk-bentuk arus yang dilakukan secara fleksibel atau dapat berjalan ke segala arah. Mulai secara vertikal, horizontal bahkan diagonal, semua itu dilaksanakan oleh humas. Bentuk arus yang dilakukan humas melalui penyebaran secara kombinasi. Selain itu, koordinasi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan juga terdapat pada Pasal 26

Bagian 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

Di bawah ini salah satu bentuk dari meningkatkan kelancaran arus informasi melalui rapat koordinasi yang didapatkan melalui akun *facebook* Humas Pemkab Ketapang.



Gambar 4.6 Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020

Sumber: Akun *facebook* Prokopim Setda Ketapang 2020, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

Rapat koordinasi dilaksanakan dari atasan ke seluruh jajaran staf pemerintah Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakilnya. Rapat koordinasi juga mencerminkan adanya koordinasi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan

Menurut Kabag Humas dan Protokol, kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik dituntut mengenai teknologi, dimana semua orang sekarang sudah memegang gawai. Humas juga bertransformasi dari yang dulu sifatnya media cetak, saat ini sudah berada pada media *online*. Kemudian, sudah berbicara industri 3.0, humas telah merencanakan hal-hal yang mengarah ke sana. Pada intinya, humas di sini mengikuti tuntutan-tuntutan zaman sehingga informasi yang diberikan akan mudah diterima oleh masyarakat. (Wawancara dengan Kabag Humas, Lampiran 2 hal. d)

Arus informasi dalam humas fleksibel dan mengalir dari segala penjuru. Tentunya, juga harus memfilter informasi jangan sampai humas memberikan informasi yang bersifat hoax. Semua informasi berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Ketapang selalu di ekspos. Baik itu dari bawah, dari atas maupun dari kiri-kanan selalu terekspos. Aksesibilitas publik pada hal-hal yang berkaitan dengan informasi harus terbuka lebar untuk masyarakat. Tapi juga ada hal-hal yang bersifat rahasia, dengan tujuan meredam hal-hal yang akan ditimbulkan dari efek itu. Misalnya, ada demo, perkelahian antar suku dan budaya yang akan membahayakan. Makanya, kita harus filter informasi-informasi tersebut. (Wawancara dengan Kabag Humas, Lampiran 2 hal. e)

Tentunya dari konsep teori yang sudah ada dengan hasil di lapangan terdapat beberapa kendala terutama dalam hal sarana dan prasarana. Humas pun tidak memungkiri bahwa sarana dan prasarana tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Masih terdapat beberapa

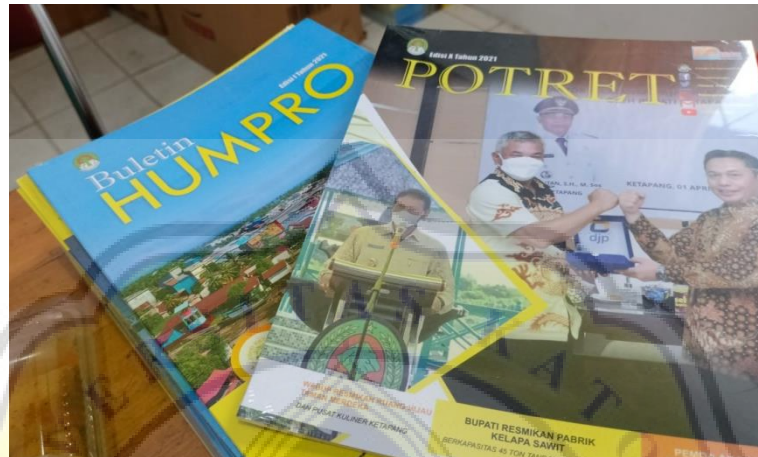
daerah yang tidak bisa menjangkau sinyal internet sehingga membuat humas menggunakan media lainnya untuk menjangkau masyarakat. Humas juga mengalami kendala kedua pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini disebabkan oleh, kurangnya SDM yang berada pada bidang humas dengan latar belakang Ilmu Komunikasi. Akibatnya para staf atau karyawan sulit mengaplikasikan pekerjaannya di bidang humas.

Pelaksanaan tugas ini lebih ditonjolkan karena Humas Ketapang melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan kata lain, humas berusaha untuk selalu meleak media. Dari peningkatan kelancaran arus informasi akan berpengaruh pada tugas-tugas humas lainnya. Mulai dari komunikasi timbal balik antar instansi ke publik sampai membangun citra positif Pemerintah Ketapang.

4.5.2 Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi

Humas Kabupaten Ketapang pada faktanya menggunakan beberapa media untuk meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi. Dalam menjalankan tugasnya humas mempublikasikan berbagai program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Ketapang melalui berbagai cara. Adapun cara penyampaian informasi yang dilakukan humas melalui berbagai media yaitu majalah, buletin, koran, televisi, radio, dan media baru serta media luar ruangan.

Buletin di bawah ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Ketapang. Berisi mengenai pra kondisi *food estate* dan kegiatan humas/bupati lainnya.



Gambar 4.7 Buletin Humpro dan Potret Pemerintah Kabupaten Ketapang
Sumber: Dokumentasi Penelitian, tanggal 25 Oktober 2021

Menurut Kabag Humas dan Protokol, penyebarluasan informasi mulai dari kendala sejauh ini belum ada. Secara internal, Bupati sangat antusias dan intens melihat informasi publik ini. Sangat sadar sekali, apapun yang kita butuhkan terkait informasi akan selalu didukung. Jadi tidak ada halangan bagi kami. Tapi untuk mengaksesnya kami sedang membangun sistem oleh Bapak Bupati seperti membangun menara-menara di beberapa daerah. (Wawancara dengan Kabag Humas, 5 Oktober 2021, Lampiran 2 hal.g)

Humas Ketapang mulai melakukan inovasi dengan selalu mengikuti perkembangan zaman. Humas berupaya memperhatikan kebutuhan publik dan mempertahankan strategi dalam menjalankan kelancaran arus informasi. Humas selalu mengedepankan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan pemerintah dengan mudah.

Berdasarkan kedua tugas humas yang terlaksana, sudah mewakili kedua tugas lainnya yaitu komunikasi timbal balik antar instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan dan memperoleh manfaat bersama serta membangun citra dan reputasi positif. Hal tersebut, berkaitan dengan tugas yang berada dalam Peraturan Bupati Ketapang mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan keprotokolan, pelayanan administratif kepada perangkat daerah yang memiliki kesamaan tugas dengan komunikasi timbal balik serta membangun citra dan reputasi positif. Kemudian, peliputan, dokumentasi, dan risalah juga termasuk ke dalam tugas meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Penyesuaian peraturan inilah yang menyebabkan dua fungsi saja yang muncul di lapangan.

4.6 Fungsi Humas Ketapang

4.6.1 Menjadi penghubung instansi dengan publiknya

Dalam membangun hubungan antar instansi dengan publiknya, tentu perlu adanya dukungan yang berkelanjutan seperti hubungan dengan pihak internal dan eksternal. Terdapat juga hubungan media yang terealisasikan dari berbagai kegiatan media yang dilakukan oleh Humas Kabupaten Ketapang. Sama halnya, dengan Humas Kabupaten Ketapang yang menjadi penghubung instansi dengan publiknya melalui publikasi media sosial *facebook* dan *instagram*.

Seperti yang ditunjukkan melalui profil akun *facebook* dan *instagram* milik Humas Ketapang sebagai bentuk penghubung antara instansi dengan publik.

Dimana halaman profil *facebook* dan *instagram* Humas Pemkab Ketapang saat ini bernama Prokopim Setda Ketapang.



Gambar 4.8 Profil akun *instagram* Prokopim Setda Ketapang
Sumber: Akun *instagram* Prokopim Setda Ketapang, diakses tanggal 10 November 2021



Gambar 4.9 Halaman *facebook* Prokopim Setda Ketapang
Sumber: Akun *facebook* Prokopim Setda Ketapang, diakses tanggal 10 November 2021

Selain itu, kegiatan humas bersama Bupati/Wakilnya dipublikasikan melalui akun media sosial berupa *facebook* dan *instagram* Prokopim Setda

Ketapang. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan selalu mendapat pembaruan terkini dari berita-berita tersebut. Berikut ini rekapan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan humas dari tahun 2017-2020 melalui media sosial.

No.	Pejabat	Media online	2017	2018	2019	2020
1	Bupati					
		Fb	6	11	22	17
		Ig	0	0	0	17
Sub total			6	11	22	34
2	Wakil Bupati	Media Online	2017	2018	2019	2020
		Fb	1	4	3	4
		Ig	0	0	0	4
		Sub total			1	4
3	Sekda	Media Online	2017	2018	2019	2020
		Fb	0	0	2	26
		Ig	0	0	0	26
		Sub total			0	0

Tabel 4.2 Kegiatan-kegiatan humas di media sosial tahun 2017-2020

Dari kegiatan yang dilakukan humas unggahan mulai aktif terpublikasi pada tahun 2020 daripada tahun-tahun sebelumnya. Akun *facebook* lebih banyak

menginformasikan kegiatan-kegiatan humas bersama dengan Bupati/Wakilnya beserta Sekretariat Daerah (Sekda). Adanya peningkatan kegiatan Bupati dari 6 unggahan di Tahun 2017 sampai 34 unggahan di Tahun 2020. Kegiatan Wakil Bupati juga mengalami peningkatan unggahan dari 1 di Tahun 2017 sampai 8 unggahan di Tahun 2020. Terakhir, kegiatan bersama Sekda tidak terdapat unggahan apapun di Tahun 2017-2018, pada Tahun 2019 memiliki 2 unggahan, dan melonjak naik di Tahun 2020 dengan 52 unggahan. Selanjutnya, terlihat pada akun *instagram* mulai aktif pada awal tahun 2020 saja dan lebih banyak menunjukkan kegiatan bersama Sekda. Akun *instagram* terbentuk pada awal tahun 2020 sehingga tidak terdapat unggahan di tahun 2016-2019.

Menurut Kabag Humas, menjadi penghubung instansi dengan publiknya sangat melekat kepada komunikasi pimpinan di Humas Ketapang. Mekanisme hubungan humas lebih fleksibel. Misalnya, program kegiatan sehingga informasi internal dan eksternal selalu didapatkan. Koordinasi selama ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sudah nyaman sekali seperti ini. Dalam menjalankan fungsi ini *public speaking* paling diutamakan dan paling penting. Karena menjadi penghubung itu tidak mudah, ketika pimpinan menyampaikan informasi secara eksternal. Pada saat pimpinan dalam keadaan tidak senang dengan informasi yang didapatkan, maka humaslah yang menyampaikan dengan baik agar pihak eksternal tetap merasa nyaman meskipun menerima teguran dan mau melaksanakan arahan tersebut. Hasil koordinasi dari instansi ke publik tidak terdapat hal-hal yang negatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan, fungsi humas menjadi penghubung instansi dengan publiknya. Tentunya setiap unit organisasi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Demikian halnya dengan humas yang mampu menjadi penghubung antar instansi dengan masyarakatnya. (Suprawoto, 2018:69)

Dari tahun ke tahun penyebaran informasi oleh humas semakin meningkat dan jauh membaik. Terlihat dari hasil rekapan kegiatan humas mulai aktif di tahun 2020. Peneliti tidak mencantumkan kegiatan di tahun 2016 karena, tidak menemukan publikasi apapun pada media sosial. Hal tersebut, disadari oleh Pimpinan Humas Ketapang saat ini. Humas akan menuntut lebih baik dari sebelumnya dari segi penyebaran informasi, sehingga publik memiliki kewajiban dalam mengetahui program kebijakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Ketapang.

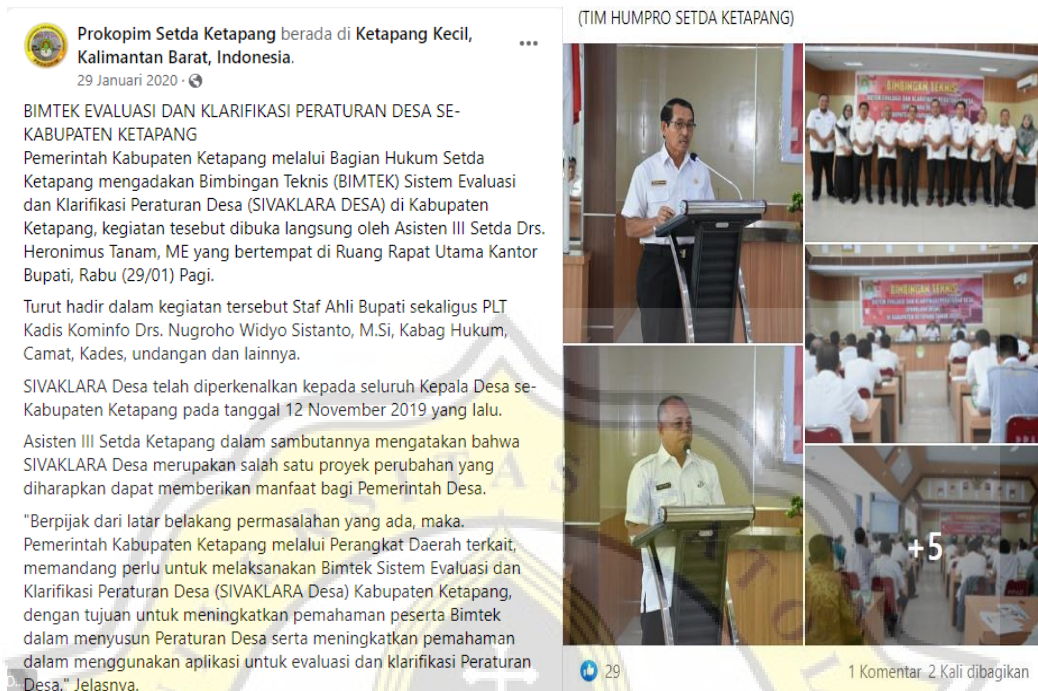
Untuk meningkatkan arus informasi dan aksesibilitas publik diperlukan fungsi penghubung antara instansi dengan publiknya sehingga keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain.

4.6.2 Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi

Humas Pemkab Ketapang tentunya melaksanakan fungsi manajemen komunikasi. Salah satunya ialah kegiatan evaluasi dan adanya klarifikasi melalui rapat-rapat pemerintahan seperti di bawah ini.



Gambar 4.10 Evaluasi Pemerintahan oleh Sekda
Sumber: Akun Facebook Prokopim Setda Ketapang, diakses 20 Oktober 2021



Gambar 4.11 Evaluasi dan Klarifikasi Humas Pemkab Ketapang 2020
 Sumber: Akun Facebook Prokopim Setda Ketapang, diakses 20 Oktober 2021

Manajemen komunikasi penting dibutuhkan dan dilaksanakan karena berkaitan dengan meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Fungsi manajemen komunikasi terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.

Kabag Humas menyatakan bahwa manajemen komunikasi harus dibudayakan agar tidak terjadi *miscommunication*. Seperti setiap pagi humas melakukan *briefing* sebelum melaksanakan tugas. Humas menciptakan ruang itu, kemudian setiap sebulan sekali melakukan evaluasi. Setiap akhir tahun kita sudah bicara penghargaan dan hukuman.

Pelaksanaan fungsi manajemen komunikasi berjalan sepenuhnya, dari Sumber Daya Manusia (SDM) masih banyak kekurangan sehingga menjadi penghambat manajemen humas. Sarana dan Prasarana sudah humas maksimal secara keseluruhan, harus berjalan sesuai arah dan terstruktur agar tidak ada yang gagal.

Dari keempat fungsi hanya dua yang terlaksana yaitu menjadi penghubung antar instansi dengan publiknya dan melaksanakan fungsi manajemen komunikasi. Dua fungsi lainnya telah terwakili oleh kedua fungsi di atas. Fungsi tersebut adalah membentuk, menciptakan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi dan menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Pelaksanaan fungsi humas disesuaikan dengan Peraturan Bupati Ketapang yang tertuang dan memiliki kesamaan dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011.

4.7 Arus Komunikasi Humas

Aliran arus komunikasi yang terjadi di Humas Ketapang memiliki kesamaan dengan pelaksanaan komunikasi organisasinya. Seperti terjadinya komunikasi vertikal dengan adanya *briefing* yang diberikan atasan kepada bawahan sebelum menjalankan tugasnya.

Kabag Humas menekankan bahwa, humas mengkomunikasikan informasi ke beberapa instansi-instansi vertikal yang ada di Kabupaten Ketapang. Kemudian, cara penyebaran informasi menggunakan cara kombinasi. Cara ini menerapkan seni yang tidak bisa kita dapatkan di teori menjadi referensi, ini akan terlihat di lapangan. (Lampiran 2, hal c)

Dari perbandingan teori sudah terdapat pelaksanaan arus komunikasi secara vertikal. Namun, belum muncul komunikasi yang terjadi di lapangan secara horizontal dan diagonal secara langsung. Berdasarkan cara penyebaran menggunakan kombinasi cara serentak dan berurutan. Humas menerima suatu informasi dalam waktu bersamaan, serta menjalankan pula informasi tersebut berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.8 Pemangku Kepentingan Publik

Humas Ketapang pada faktanya tidak mengelompokkan secara spesifik pemangku kepentingan baik dari internal dan eksternal secara umum. Tidak terdapat pengelompokan seperti publik internal dan eksternal primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan wawancara dengan Kabag Humas Pemkab Ketapang Doni Andriawan, humas menghindari hal-hal yang bersifat mengelompokkan. Dengan melihat kondisi lapangan tidak bisa mengelompokkan sasaran publik. Tapi memang ada hal-hal yang harus ditampilkan. Humas sebagai penyambung lidah pimpinan dan masyarakat jadi tujuannya untuk semua. (Wawancara dengan Kabag Humas, 5 Oktober 2021, Lampiran 2 hal. h)

Dari fakta dan wawancara di lapangan peneliti menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan teori pemangku kepentingan publik dalam Permenpan Nomor 54 Tahun 2011. Ketidaksesuaian tersebut muncul karena pengelompokan publik secara spesifik bertolak belakang dengan Humas Ketapang. Humas Ketapang tentunya memiliki kewenangan sendiri akan kebijakan terhadap publiknya.

4.9 Hubungan Media

Pada kenyataannya Humas Ketapang menerapkan beberapa kegiatan bersama media. Melalui situs resmi Diskominfo Ketapang terlihat dari siaran pers, dan kunjungan ke radio.

Perkuat SP4N LAPOR!, Menteri Johnny: Kominfo Siapkan Dukungan Teknis dan Komunikasi Publik

Diposkan pada *September 9, 2021*

Siaran Pers No. 325/HM/KOMINFO/09/2021 Kamis, 9 September 2021 Tentang Perkuat SP4N LAPOR! Menteri Johnny: Kominfo Siapkan Dukungan Teknis dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen memberikan dukungan dalam penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!). Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan dukungan dalam pengelolaan aplikasi aduan layanan publik berbasis elektronik [...]

Diposkan dalam *BERITA*

Gambar 4.12 Siaran Pers Humas dan Protokol
Sumber: Situs resmi Diskominfo Ketapang

Teknisi Senior RPKD Silaturahmi ke Radio

Diposkan pada *September 24, 2021*

PENGELOLAAN Radio Kabupaten Ketapang diserahkan Bagian Humas dan Protokol ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang pada akhir tahun 2017. Karena penyerahan tanggungjawab ini, tentu saja petugas yang pada hari ini masih setia menyapa pendengar, berapa diantaranya tak banyak mengetahui sejarah dan latar belakang perjalanan panjang media Begitu juga dengan regulasi yang pernah diterbitkan. Pokok inti [...]

Diposkan dalam *BERITA*

Gambar 4.13 Kunjungan Silaturahmi ke Radio
Sumber: Situs Resmi Diskominfo Ketapang

Menurut Kabag Humas Ketapang hubungan media yang dilakukan semuanya ada. Semua perangkat media digunakan sehingga sampai saat ini tren kami sangat positif dan aktif sekali. (Lampiran 2, hal. h)

Berdasarkan teori yang ada di Permenpan Nomor 55 Tahun 2011 kegiatan hubungan media Humas Ketapang terlaksana dua kegiatan saja dari total keseluruhan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Kabag Humas

yang mengatakan melakukan semua kegiatan dan menggunakan perangkat media dengan aktif.

